

SIKAP MASYARAKAT TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) MENJADI AREAL PERTAMBANGAN BATU

*Community Attitudes On Changes In Land Function Of Green Open Space
(GOS) Become A Mining Area*

Tsabita Naqiyya, Hari Kaskoyo, dan Rommy Qurniati
Fakultas Pertanian Universitas Lampung

ABSTRACT. *Global warming is a problem that must be faced by living things. To reduce global warming by providing Green Open Space (GOS). GOS in the city of Bandar Lampung has experienced a broad decline due to the rampant land conversion as happened at Bukit Sukamenanti, due to the existence of rock mining. The purpose of this study was to determine the attitudes of the community, the relationship between the level of knowledge and attitudes and willingness to pay the community to maintain open green space. The sampling method used was simple random sampling with a total of 93 respondents consisting of 35 miners and 58 non-miners. Data collection uses observation, interview and literature studies. Data analysis using quantitative descriptive analysis techniques. The results of the study is the attitude of the community refused to change land use as much as 66.5%. The level of knowledge has a very significant positive relationship to the attitude of the non mining community, but has a non-significant negative relationship between the level of knowledge and the attitude of the mining community. The higher the level of knowledge the community is not the miner, the more positive his attitude will be. But for the mining community, even though they have a high level of knowledge, they do not have an influence on attitudes because of the economic needs that must be met from mining. Total value of willingness to pay the community to maintain green open space is Rp.89.185.648/month.*

Key words: *land use change; global warming; mining; attitude.*

ABSTRAK. Saat ini pemanasan global menjadi masalah yang harus dihadapi oleh makhluk hidup. Pemanasan global dapat dikurangi dengan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Namun, RTH di Kota Bandar Lampung saat ini mengalami penurunan luas karena maraknya alih fungsi lahan seperti yang terjadi di RTH Bukit Sukamenanti akibat adanya pertambangan batu. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan karakteristik dan sikap masyarakat terhadap pertambangan batu (2) menganalisis hubungan faktor tingkat pengetahuan dan persepsi terhadap sikap masyarakat (3) menganalisis nilai kesediaan membayar masyarakat untuk perbaikan RTH. Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu simple random sampling dengan jumlah responden sebanyak 93 orang yang terdiri dari 35 orang masyarakat penambang dan 58 orang masyarakat bukan penambang. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi literatur. Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan sikap masyarakat menolak terhadap alih fungsi lahan sebanyak 66,5% karena beranggapan bahwa kegiatan pertambangan batu menyebabkan kerusakan lingkungan. Tingkat pengetahuan dan persepsi memiliki hubungan positif sangat signifikan terhadap sikap masyarakat bukan penambang, namun memiliki hubungan negatif tidak signifikan antara tingkat pengetahuan dengan sikap masyarakat penambang. Semakin tinggi tingkat pengetahuan masyarakat bukan penambang maka akan semakin positif sikapnya. Namun bagi masyarakat penambang, walaupun memiliki tingkat pengetahuan tinggi dan persepsi yang baik, tidak memberikan pengaruh terhadap sikap karena kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi dari pertambangan. Nilai rerataan yang diperoleh dari kesediaan membayar sebesar Rp. 57.688,17/org/bulan sehingga diperoleh nilai total kesediaan membayar masyarakat untuk mempertahankan RTH sebesar Rp. 89.185.648/bulan.

Kata kunci: alih fungsi lahan; pemanasan global; pertambangan; sikap

Penulis untuk korespondensi: Email: Tsabitanakiyya26@gmail.com

PENDAHULUAN

Global warming adalah meningkatnya suhu rata-rata bumi sehingga menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup berbagai ekosistem yang disebabkan oleh perubahan penggunaan lahan sehingga cadangan karbon berkurang (Setiawan dan Hermana, 2013 ; Setiawan *et al.*, 2015). Saat ini, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pemanasan global khususnya di wilayah perkotaan adalah dengan adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH). Ruang terbuka hijau berfungsi untuk menyeimbangkan keadaan ekologi pada suatu kawasan agar terjadi keseimbangan antara ekosistem dan perkembangan pembangunan di era modern (Nurhanafi *et al.*, 2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, proporsi RTH adalah minimal 30% dari total luas kota yang terdiri dari 20% RTH Publik dan 10% RTH privat. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2011-2030 menyebutkan bahwa strategi peningkatan fungsi, kualitas dan kuantitas RTH dengan mempertahankan dan merevitalisasi hutan lindung, hutan kota dan ruang terbuka hijau untuk mewujudkan minimum RTH 30 (tiga puluh) persen dari total luas kota. Namun, menurut Yanti (2016) proporsi RTH di Kota Bandar Lampung saat ini semakin berkurang. Menurut Satriana *et al* (2015) RTH di Kota Bandar Lampung saat ini belum mencapai 30% dari total wilayah kota.

Berdasarkan UU No 26 Tahun 2007 dan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung menyatakan bahwa Bukit Sukamenanti Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung merupakan salah satu bukit yang diperuntukkan sebagai RTH. Sulistyorini *et al.* (2015) menyatakan RTH di wilayah perkotaan sangat rentan terhadap konversi lahan untuk penggunaan lain yang secara ekonomi lebih menjanjikan. Saat ini, salah satu RTH yang sedang mengalami konversi lahan adalah RTH Bukit Sukamenanti yang terletak di Kelurahan Sukamenanti dan Sukamenanti Baru, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Permasalahan yang terjadi di RTH Bukit Sukamenanti disebabkan karena adanya aktifitas pertambangan batu.

Menurut Arief (2015), pada tahun 2015 kegiatan pertambangan di Bukit Sukamenanti telah mendapat peringatan dari pemerintah daerah karena seharusnya Bukit Sukamenanti diperuntukkan sebagai salah satu hutan kota di Bandar Lampung.

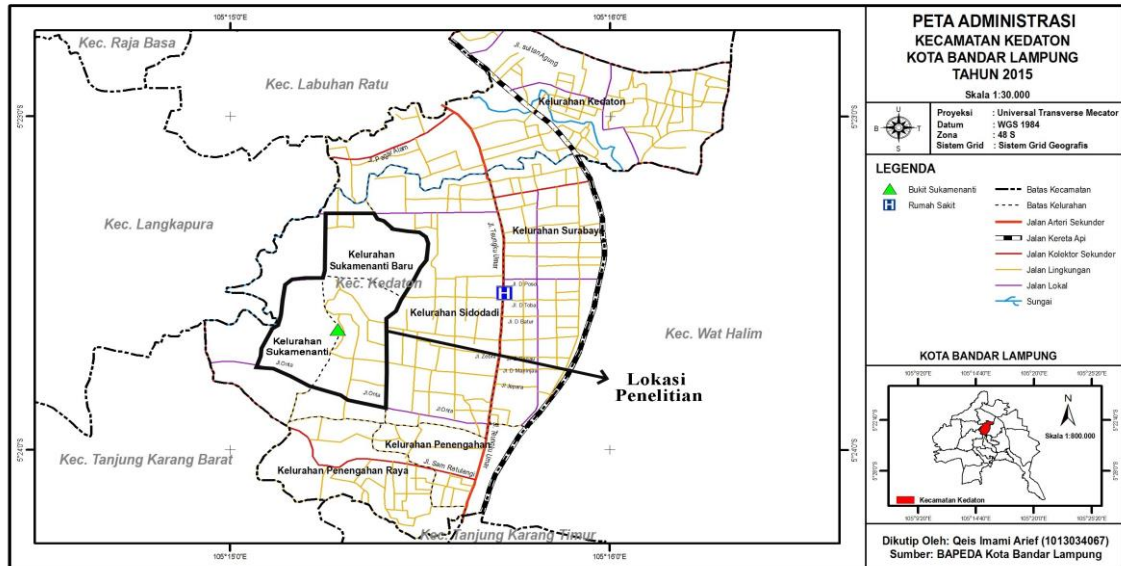
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sikap masyarakat pemanfaat hutan cenderung netral terhadap alih fungsi lahan serta tingkat pengetahuan yang dimiliki masyarakat pemanfaat hasil hutan, memiliki hubungan positif yang tidak signifikan terhadap sikap. Hal tersebut dikarenakan masyarakat yang memiliki tingkat pengetahuan dan persepsi tinggi mengenai kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan, namun karena terdesak kebutuhan ekonomi menjadikan masyarakat cenderung netral terhadap adanya kegiatan alih fungsi lahan hutan walaupun berlawanan dengan kemauan masyarakat tersebut (Darwin *et al*, 2016 ; Suryadi *et al*, 2015 ; Masria *et al*, 2015).

Penelitian terkait alih fungsi lahan di RTH Bukit Sukamenanti belum dilakukan dan berdasarkan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung bahwa sebagian besar luas RTH Bukit Sukamenanti telah menjadi areal pertambangan batu, sehingga penelitian mengenai sikap masyarakat terhadap alih fungsi lahan RTH menjadi areal pertambangan batu di Bukit Sukamenanti penting untuk dilakukan guna menjaga keberadaan RTH. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 1) mendeskripsikan karakteristik dan sikap masyarakat penambang dan bukan penambang terhadap alih fungsi lahan RTH, 2) menganalisis hubungan antara tingkat pengetahuan dengan sikap masyarakat terhadap alih fungsi lahan dan 3) menganalisis kesediaan membayar masyarakat dalam rangka upaya mempertahankan keberadaan RTH.

METODE PENELITIAN

Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Peta penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.

Penelitian dilakukan pada September hingga Desember 2018 di Kelurahan Sukamenanti dan Sukamenanti Baru,



Gambar 1. Lokasi penelitian (Arief, 2015).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Sumber data primer diperoleh berdasarkan survei langsung dan wawancara menggunakan kuisioner di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur dan data dari instansi-instansi terkait. Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kuisioner, alat tulis, kamera, kalkulator, alat perekam suara, laptop, *Software Microsoft Excel*, dan *Software Statistic*.

Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi literatur. Penentuan jumlah responden menggunakan Rumus Slovin, sehingga diperoleh total responden sebanyak 93 orang. Pengambilan sampel menggunakan metode *simple random sampling* pada masyarakat yang telah dibagi berdasarkan strata masyarakat penambang batu sebanyak 35 orang dan masyarakat bukan penambang batu sebanyak 58 orang. Analisis data menggunakan Skala *Likert* dengan memberikan skor pada setiap jawaban pertanyaan yang digunakan untuk mengukur sikap masyarakat terhadap adanya kegiatan pertambangan apakah menolak, netral atau

menerima kegiatan tersebut beroperasi di kawasan RTH(Sugiyono, 2011). Setelah diperoleh skor penilaian sikap masyarakat, dilakukan analisis data untuk mengetahui adakah hubungan antara tingkat pengetahuan dan persepsi terhadap sikap masyarakat menggunakan Uji korelasi *Rank Spearman* (Sugiyono, 2011). Dengan hipotesis :

H_0 : tidak terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan dan persepsi terhadap sikap masyarakat.

H_1 : terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan dan persepsi terhadap sikap masyarakat.

Apabila nilai sig > 0,05 (nilai sig lebih besar dari 0,05) maka H_0 diterima, jika nilai sig < 0,05 (nilai sig lebih kecil dari 0,05) maka H_0 ditolak.

Apabila penilaian sikap telah diperoleh, dilakukan analisis penghitungan nilai kesediaan membayar *Willingness to Pay* (WTP) dengan metode CVM (*Contingent Valuation Method*) yaitu metode survei untuk mengestimasi seberapa besar penilaian masyarakat terhadap jasa lingkungan dan kenyamanan yang

dihasilkan oleh keberadaan RTH Bukit Sukamenanti sehingga bersedia membayar dalam upaya perbaikan RTH. Nilai estimasi yang diperoleh berupa nilai rerataan dan nilai total kesediaan membayar masyarakat untuk mempertahankan keberadaan RTH. Metode ini banyak digunakan untuk mengestimasi nilai atau sesuatu yang tidak diperjual belikan di pasar (Hasiani *et al*, 2013).

Nilai rata-rata yang akan dikeluarkan oleh responden yang bersedia membayar dapat dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini (Dhaniswara, 2014).

$$EWTP = \frac{\sum_{i=1}^n W_i}{n} \quad (1)$$

Sedangkan nilai total kesediaan membayar dapat dihitung menggunakan rumus (Dhaniswara, 2014).

$$TWTP = \sum_{i=1}^n WTP_i \left(\frac{n_i}{N} \right) P \quad (2)$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, karakteristik dan sikap responden dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi karakteristik dan sikap masyarakat bukan penambang serta karakteristik dan sikap masyarakat penambang. Karakteristik dan sikap masyarakat penambang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik dan sikap masyarakat penambang

No	Karakteristik Responden	Sikap Masyarakat			Jumlah orang (%)
		Menolak orang (%)	Netral Orang (%)	Menerima Orang (%)	
1.	Pendidikan				
	SD	0 (0%)	0 (0%)	4 (11%)	4 (11%)
	SMP	0 (0%)	0 (0%)	10 (29%)	10 (29%)
	SMA	0 (0%)	0 (0%)	21 (60%)	21 (60%)
	Jumlah	0 (0%)	0 (0%)	35(100%)	35 (100%)
2.	Pendapatan (juta/bulan)				
	≤2	0 (0%)	0 (0%)	1 (3%)	1(3%)
	2,1 – 3	0 (0%)	0 (0%)	30 (86%)	30 (86%)
	3,1 – 4	0(0%)	0 (0%)	4 (11%)	4 (11%)
	Jumlah	0 (0%)	0 (0%)	35 (100%)	35 (100%)
3.	Pekerjaan sampingan				
	Ada	0 (0%)	0 (0%)	13 (37%)	13 (37%)
	Tidak ada	0 (0%)	0 (0%)	22 (63%)	22 (63%)
	Jumlah	0 (0%)	0 (0%)	35 (100%)	35 (100%)
4.	Jumlah Tanggungan (orang)				
	1-2	0 (0%)	0 (0%)	8 (23%)	8 (23%)
	3-4	0 (0%)	0 (0%)	25 (71%)	25 (71%)
	≥5	0 (0%)	0 (0%)	2 (6%)	2 (6%)
	Jumlah	0 (0%)	0 (0%)	35 (100%)	35 (100%)

5.	Jarak rumah ke RTH (meter)				
	≤100-500	0 (0%)	0 (0%)	25 (72%)	25 (72%)
	600-900	0 (0%)	0 (0%)	6 (17%)	6 (17%)
	≥1000	0 (0%)	0 (0%)	4 (1%)	4 (11%)
	Jumlah	0 (0%)	0 (0%)	35 (100%)	35 (100%)
6.	Lama kerja (tahun)				
	1-10	0 (0%)	0 (0%)	4 (11%)	4 (11%)
	11-20	0(0%)	0 (0%)	23 (66%)	23 (66%)
	≥21	0 (0%)	0(0%)	8 (23%)	8 (23%)
	Jumlah	0 (0%)	0 (0%)	35 (100%)	35 (100%)

Seluruh responden yang profesinya penambang memilih untuk bersikap menerima kegiatan pertambangan di RTH karena dengan adanya kegiatan pertambangan, maka penambang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pendapatan rata-rata penambang sebesar Rp. 2.000.000 hingga Rp. 3.000.000 perbulan dengan lama kerja sebanyak 7 hingga 8 jam per harinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambang yang memiliki pengalaman kerja lebih dari 20 tahun dan memiliki usia produktif dapat memperoleh pendapatan yang semakin tinggi pula mencapai Rp. 4.200.000 perbulan. Hal tersebut disebabkan karena para penambang memiliki keahlian yang lebih handal dalam memperoleh hasil tambang seperti kemampuan yang lebih baik dalam memakai alat untuk memecah batu dan kemampuan fisik yang sudah terlatih dengan baik sehingga jumlah batu yang dihasilkan semakin banyak. Menurut Harianja dan Sukmana (2012) usia produktif dalam kegiatan pertambangan adalah usia 35 hingga 50 tahun.

Sebanyak 37% penambang memiliki pekerjaan sampingan seperti buruh bangunan, tukang ojeg dan pedagang. Namun, sebesar 63% penambang hanya mengandalkan penghasilannya dari hasil menambang sehari-hari. Tingginya angka masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan sampingan mengakibatkan para penambang khawatir jika kehilangan pekerjaannya sebagai penambang, terlebih lagi jika pemerintah dengan tegas melarang kegiatan pertambangan tanpa memberikan pelatihan khusus sebagai bekal penambang

untuk mendapatkan pekerjaan alternatif. Para penambang juga khawatir apabila RTH Bukit Sukamenanti akan rusak dan habis dalam kurun waktu beberapa puluh tahun kedepan karena penambang berpotensi kehilangan matapencaharian utamanya. Namun, pekerjaan ini tetap saja memiliki resiko yang sangat tinggi karena selain berpotensi merusak RTH, juga mampu membahayakan diri sendiri karena tidak menggunakan alat pengaman untuk menambang.

Letak rumah para penambang tersebar di Kelurahan Sukamenanti dan Sukamenanti Baru. Jarak rumah penambang ke RTH antara 20 meter hingga lebih dari 1 kilometer, namun jarak yang jauh pun bukan menjadi hambatan bagi para penambang untuk tetap bekerja. Sebagian besar penambang memilih pekerjaan ini karena beranggapan bahwa tidak memiliki keahlian untuk melamar pekerjaan lain dan pekerjaan ini dianggap cukup mampu menopang kebutuhan hidup sehari hari. Namun, sebanyak 20% responden memilih bekerja sebagai penambang karena pada tahun 1998 terjadi PHK pada perusahaan akibat krisis moneter yang mengakibatkan masyarakat kehilangan pekerjaan dan memilih menjadi penambang. Budaya menambang untuk membantu perekonomian keluarga yang diajarkan orangtua sejak tahun 1960an pun menjadi alasan kuat para penambang untuk tetap menjalani profesi sebagai penambang batu.

Tingkat pengetahuan para penambang mengenai RTH tidak dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya karena walaupun pendidikannya rendah, para penambang

tetap paham mengenai pentingnya menjaga keberadaan RTH dan fungsi ekologiannya. Hal tersebut disebabkan oleh adanya keterkaitan antara mata pencaharian para penambang dalam waktu jangka panjang dengan kelestarian RTH, apabila RTH tidak dilestarikan maka para penambang akan

kehilangan pekerjaan utamanya. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan karakteristik dan sikap antara masyarakat bukan penambang dengan masyarakat penambang. Karakteristik dan sikap masyarakat bukan penambang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Karakteristik dan sikap masyarakat bukan penambang.

No.	Karakteristik Responden	Sikap Masyarakat			Jumlah Orang (%)
		Menolak orang (%)	Netral Orang (%)	Menerima Orang (%)	
1.	Pendidikan				
	SD	5 (8%)	5 (8%)	1 (2%)	11 (18%)
	SMP	11 (18%)	0 (0%)	0 (0%)	11 (18%)
	SMA	19 (34%)	1 (2%)	0 (0%)	20 (36%)
	D3/S1/S2	16 (28%)	0 (0%)	0 (0%)	16 (28%)
	Jumlah	51 (88%)	6 (10%)	1 (2%)	58 (100%)
2.	Pendapatan (juta/bulan)				
	≤2	17 (30%)	5 (8%)	1 (2%)	23 (40%)
	2,1 – 3	19 (33%)	1 (2%)	0 (0%)	20 (35%)
	3,1 – 4	6 (10%)	0 (0%)	0(0%)	6 (10%)
	>4	9 (15%)	0 (0%)	0 (0%)	9 (15%)
	Jumlah	51 (88%)	6 (10%)	1 (2%)	58 (100%)
3.	Pekerjaan				
	Buruh	11 (18%)	2 (4%)	1 (2%)	14 (24%)
	Wirausaha	13 (23%)	4 (6%)	0 (0%)	17 (29%)
	PNS	4 (7%)	0 (0%)	0 (0%)	4 (7%)
	Lainnya	23 (40%)	0 (0%)	0 (0%)	23 (40%)
	Jumlah	51 (88%)	6 (10%)	1 (2%)	58 (100%)
4.	Jumlah Tanggungan (orang)				
	0-2	25 (43%)	3 (5%)	0 (0%)	28 (48%)
	3-5	25 (43%)	3 (5%)	0 (0%)	28 (48%)
	≥6	1 (2%)	0 (0%)	1 (2%)	2 (4%)
	Jumlah	51 (88%)	6 (10%)	1 (2%)	58 (100%)
5.	Jarak rumah ke RTH (meter)				
	≤100-500	35 (60%)	3 (5%)	1 (2%)	39 (67%)
	600-900	8 (14%)	0 (0%)	0 (0%)	8 (14%)
	≥1000	8 (14%)	3 (5%)	0 (0%)	11 (19%)
	Jumlah	51 (88%)	6 (10%)	1 (2%)	58 (100%)

Berdasarkan Tabel 2, sebanyak 88% responden menolak, 10% netral dan 2% menerima adanya kegiatan pertambangan di Kawasan RTH. Responden yang memiliki pendidikan tinggi 100% menolak kegiatan pertambangan karena beranggapan bahwa kegiatan pertambangan menyebabkan polusi udara, banjir, kekeringan serta menguntungkan sebagian pihak tanpa mempertanggungjawabkan kerugian yang dialami pihak lain, sedangkan responden dengan pendidikan yang rendah sebanyak 2% responden yang berprofesi sebagai buruh, menerima kegiatan pertambangan karena menganggap RTH memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari tanpa memperhatikan dampak lingkungan yang telah terjadi.

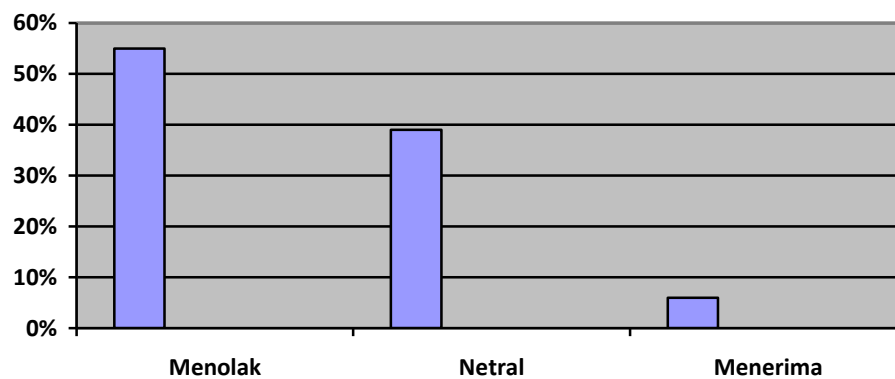
Berdasarkan hasil analisis data, masyarakat bukan penambang dengan tingkat pendidikan tinggi memilih untuk menolak adanya kegiatan pertambangan di RTH. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Prasada *et al.* (2016) bahwa tingginya tingkat pendidikan masyarakat menyebabkan sikap yang positif untuk menjaga kelestarian hutan. Masyarakat dengan pendidikan tinggi, memiliki pemahaman yang baik mengenai RTH dan mengetahui resiko melakukan kegiatan pertambangan karena selain berbahaya bagi lingkungan, juga berbahaya bagi keselamatan diri sendiri. Tingkat pendidikan tinggi yang dimiliki masyarakat bukan penambang diiringi dengan tingginya jumlah pendapatan yang diperoleh. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nababan *et al.* (2016) masyarakat dengan pendidikan yang tinggi akan mempengaruhi mata pencaharian atau pekerjaan seorang individu, individu yang memiliki bekal ilmu dan tingkat pendidikan yang tinggi akan berusaha keras mendapatkan pekerjaan yang baik untuk memenuhi hidupnya. Dalam penelitian ini, masyarakat lebih memilih bekerja sebagai pengusaha, dosen, perawat, pegawai swasta dan PNS daripada menjadi penambang. Hal tersebut karena selain memiliki pendapatan yang tinggi, masyarakat pun tidak berminat untuk

menjadi penambang karena mempertimbangkan dampak lingkungan yang akan ditimbulkan serta resiko pekerjaan yang tinggi.

Responden yang memiliki jumlah tanggungan tinggi dan memilih untuk bersikap menerima kegiatan pertambangan di RTH disebabkan karena masyarakat menganggap kegiatan tersebut mampu untuk menambah pendapatan. Menurut Purwanti dan Rohayati (2014) semakin tinggi jumlah tanggungan maka kebutuhan rumah tangga akan semakin meningkat pula sehingga partisipasi masyarakat untuk bekerja akan meningkat untuk menambah pendapatan.

Sebanyak 60% masyarakat yang bertempat tinggal dekat dengan lokasi penelitian, menunjukkan sikap tidak setuju dengan adanya kegiatan pertambangan. Hal tersebut disebabkan karena kegiatan pertambangan menimbulkan dampak yang sangat merugikan masyarakat antara lain peningkatan suhu, polusi udara, longsor, kekeringan dan banjir. Senada dengan penelitian Tampubolon (2011) bahwa masyarakat sekitar areal pertambangan batu merasa terganggu karena menimbulkan peningkatan suhu udara, menurunnya kualitas udara karena partikel debu dan sulitnya mendapatkan air bersih karena berkurangnya vegetasi yang berfungsi sebagai penyerap air. Adanya kegiatan pertambangan di kawasan RTH juga mengganggu kenyamanan masyarakat karena banyak pekerja yang kehilangan nyawa akibat menambang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pradana (2017) areal pertambangan batu sangat berpotensi menjadi kawasan rawan bencana, hal tersebut dikarenakan lahan yang ditambang membentuk jurang dan cekungan sehingga menimbulkan banyak korban jiwa akibat jatuh ke dalamnya.

Sikap masyarakat berdasarkan analisis secara Skala *Likert* mencakup sikap masyarakat penambang dan bukan penambang yang dapat dilihat secara jelas pada Gambar 2.



Gambar 2. Diagram penilaian sikap masyarakat terhadap kegiatan pertambangan

Responden yang menolak kegiatan pertambangan disebabkan oleh dampak merugikan yang telah dirasakan masyarakat akibat alih fungsi lahan RTH, sedangkan responden yang memilih untuk cenderung netral disebabkan karena masyarakat beranggapan tidak merasakan keuntungan maupun kerugian dari adanya kegiatan pertambangan. Namun, responden yang menerima adanya kegiatan pertambangan di RTH, karena kebutuhan hidup

masyarakat yang harus dipenuhi sangat bergantung kepada hasil menambang batu. Menurut penelitian yang dilakukan Masria *et al.* (2015) sikap masyarakat yang eksploitatif terhadap hutan dapat mengancam kelestarian hutan itu sendiri

Berdasarkan penilaian sikap yang telah diperoleh, diketahui hubungan antara tingkat pengetahuan terhadap sikap masyarakat terhadap alih fungsi lahan RTH dapat dilihat secara jelas pada Tabel 3.

Tabel 3. Hubungan antara tingkat pengetahuan terhadap sikap masyarakat.

No.	Variabel Terikat Sikap	Variabel Bebas		Keterangan
		Correlation	Sig(2-Tailed)	
1.	Tingkat pengetahuan masyarakat bukan penambang	0,394	0,002	Sangat signifikan
2.	Tingkat pengetahuan masyarakat penambang	-0,182	0,295	Tidak signifikan

Sumber : Data Primer (2018).

Pengujian antara hubungan sikap terhadap pertambangan batu dengan tingkat pengetahuan masyarakat bukan penambang diperoleh nilai *Sig(2-tailed)* sebesar 0,002 dan nilai *correlation coefficient* positif sebesar 0,394. Nilai Sig $0,002 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi positif sangat signifikan antara variabel sikap dengan variabel tingkat pengetahuan masyarakat. Hasil analisis deskriptif antara sikap terhadap kegiatan pertambangan dengan tingkat pengetahuan masyarakat bukan penambang cenderung tinggi. Masyarakat yang mempunyai pengetahuan tinggi akan menolak kegiatan pertambangan batu karena masyarakat khawatir apabila RTH akan habis di waktu yang akan datang, dan meningkatkan peluang terjadinya dampak lingkungan dan bencana alam seperti

pemanasan global, banjir, kekeringan dan polusi udara.

Pengujian antara hubungan sikap terhadap pertambangan batu dengan tingkat pengetahuan masyarakat penambang diperoleh nilai *Sig(2-tailed)* sebesar 0,295 dan nilai *correlation coefficient* negatif sebesar -0,182. Nilai Sig $0,295 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi negatif tidak signifikan antara variabel sikap dengan variabel tingkat pengetahuan masyarakat penambang. Hasil analisis deskriptif antara sikap terhadap kegiatan pertambangan dengan tingkat pengetahuan masyarakat penambang adalah masyarakat penambang mempunyai tingkat pengetahuan yang tinggi, namun masyarakat tetap menerima adanya kegiatan tersebut. Senada dengan penelitian yang dilakukan Surati (2014)

menambahkan sikap masyarakat terhadap hutan tidak dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan. Darwin *et al.* (2016) menambahkan bahwa tingkat pengetahuan tidak memiliki hubungan dengan sikap

masyarakat karena adanya konflik antara kebutuhan ekonomi dan lingkungan.

Hasil penelitian mengenai hubungan persepsi terhadap sikap masyarakat dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Hubungan antara persepsi terhadap sikap masyarakat.

No.	Variabel Terikat Sikap	Variabel Bebas		Keterangan
		Correlation	Sig(2-Tailed)	
1.	Persepsi masyarakat bukan penambang	0,486	0,000	Sangat signifikan
2.	Persepsi masyarakat penambang	-0,264	0,125	Tidak signifikan

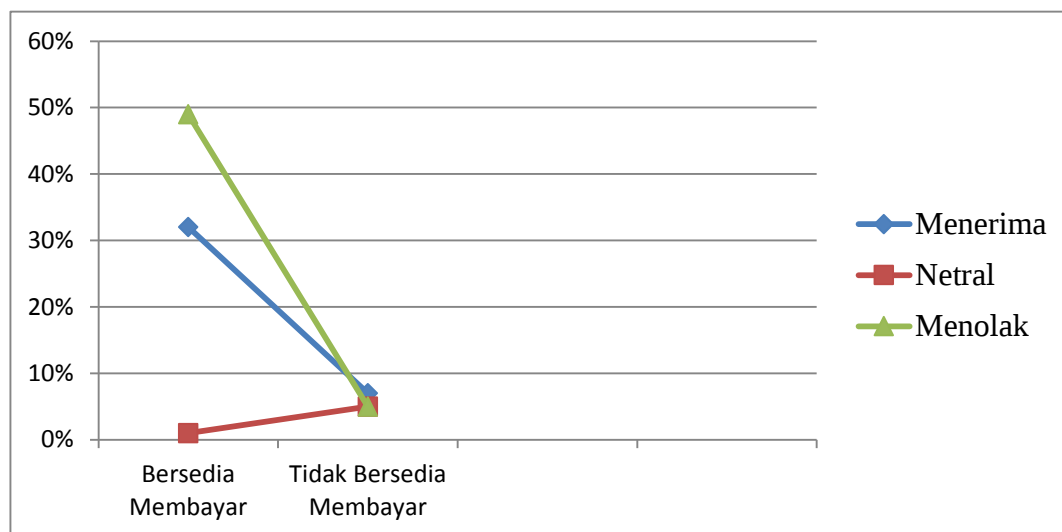
Sumber : Data Primer (2018).

Berdasarkan Tabel 4, hubungan antara persepsi terhadap sikap masyarakat bukan penambang diketahui nilai *Sig(2-tailed)* sebesar 0,000 dan nilai *correlation coefficient* positif sebesar 0,486. Hal tersebut senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Darwin *et al.* (2016) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara sikap masyarakat terhadap pertambangan emas tanpa izin di sekitar kawasan hutan Pematang Gadung dengan persepsi masyarakat. Hasil analisis deskriptif pada penelitian ini, bahwa persepsi masyarakat bukan penambang terhadap aktifitas pertambangan batu cenderung tinggi dan menolak adanya aktifitas pertambangan. Masyarakat bukan penambang di lokasi penelitian yang mempunyai persepsi tinggi memiliki pemahaman yang tinggi terhadap dampak negatif yang ditimbulkan dari alih fungsi lahan RTH menjadi areal pertambangan batu. Menurut Irawan *et al.* (2017) persepsi

masyarakat terhadap kawasan RTH tinggi karena sebagian besar masyarakat memahami fungsinya untuk lingkungan sekitar dan mampu mencegah terjadinya bencana alam.

Hasil Uji korelasi mengungkapkan adanya hubungan yang berbeda antara persepsi masyarakat penambang dengan masyarakat bukan penambang terhadap sikap, diketahui nilai *Sig(2-tailed)* sebesar 0,125 dan nilai *correlation coefficient* negatif sebesar -0,264. Hasil analisis deskriptif pada penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun persepsi masyarakat penambang terhadap aktifitas pertambangan batu cenderung tinggi namun masyarakat memilih menerima adanya aktifitas pertambangan.

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, diperoleh kesediaan membayar berdasarkan sikap masyarakat yang dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Kesediaan membayar berdasarkan sikap masyarakat.

Rachdian A (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa perubahan tutupan lahan memberikan pengaruh terhadap kuantitas dan kualitas jasa lingkungan. Menurut Napitupulu *et al.* (2013) kegiatan jasa lingkungan yang dapat dilakukan dalam pemanfaatan jasa lingkungan adalah pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati dan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon. Dengan adanya program imbal jasa lingkungan, diharapkan mampu mengurangi kerusakan di RTH Sukamenanti. Sebanyak 32% masyarakat yang menerima adanya kegiatan pertambangan di RTH antara lain didominasi oleh masyarakat penambang, bersedia untuk membayar dalam upaya perbaikan RTH, namun terdapat 5% masyarakat yang menolak kegiatan pertambangan yang tidak bersedia untuk membayar. Kesiadaan membayar masyarakat penambang disebabkan oleh adanya kesadaran akan dampak pertambangan yang telah ditimbulkan serta kekhawatiran terhadap kelestarian keberadaan RTH. Namun, bukan berarti masyarakat bukan penambang yang tidak bersedia membayar tidak memiliki kesadaran terhadap perbaikan RTH, hanya saja pengaruh kebutuhan ekonomi yang belum tercukupi menyebabkan masyarakat memilih untuk memprioritaskan kebutuhan primernya terlebih dahulu.

Besar nilai yang diperoleh dari kesiadaan membayar masyarakat untuk mempertahankan keberadaan RTH Bukit Sukamenanti antara Rp.10.000 hingga Rp.500.000 /bulan. Semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi nilai yang akan dikeluarkan oleh masyarakat untuk mempertahankan RTH (Sudjarmoko *et al.*, 2015). Nilai rerataan WTP dari masyarakat untuk mempertahankan keberadaan RTH adalah sebesar Rp. 57.688,17/org/bulan sehingga diperoleh nilai total WTP masyarakat untuk mempertahankan keberadaan RTH Bukit Sukamenanti sebesar Rp.89.185.648/bulan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Simpulan dalam penelitian ini adalah sikap masyarakat cenderung menolak

kegiatan pertambangan di kawasan RTH. Terdapat hubungan positif sangat signifikan antara tingkat pengetahuan dan persepsi terhadap sikap masyarakat bukan penambang, bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan dan persepsi maka sikap yang ditunjukkan masyarakat bukan penambang cenderung menolak kegiatan pertambangan, namun terdapat hubungan negatif tidak signifikan antara tingkat pengetahuan dan persepsi terhadap sikap masyarakat penambang karena walaupun memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi, masyarakat penambang menerima kegiatan pertambangan yang merupakan mata pencaharian utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Adanya potensi rehabilitasi lahan RTH yang diperoleh berdasarkan hasil swadaya masyarakat dalam rangka upaya mempertahankan keberadaan RTH sebesar Rp.64.380.000/tahun.

Saran

Perlu adanya rehabilitasi lahan RTH dan sosialisasi dengan masyarakat penambang agar dapat lebih bijaksana dalam menentukan sikap terhadap alih fungsi lahan RTH, diperlukan pula pelatihan sebagai modal untuk mencari pekerjaan alternatif lain agar masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan hidup tanpa merusak RTH yang luasannya semakin berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, I.Q. 2015. Profil penambang batu Bukit Sukamenanti di Kelurahan Sukamenanti Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung tahun 2015. *J. Penelitian Geografi*. (Online). 4 (2) : 1-16. (<http://id.portalgaruda.org/>, diakses 2 Juni 2018).
- Darwin., Zainal, S. dan Herawatiningsih, R. 2016. Sikap masyarakat terhadap aktifitas pertambangan emas tanpa izin di sekitar kawasan hutan Pematang Gadung Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang. *J. Hutan Lestari*. (Online). 4(4) : 486-495. (<http://jurnal.untan.ac.id/>, diakses 3 Juli 2018).

- Dhaniswara, M. 2014. *Analisis Willingness To Pay menuju pelestarian ekosistem wisata bahari Karimunjawa, Jawa Tengah*. Skripsi. Semarang : Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro. 95 hlm.
- Harianja, A. dan Sukmana, A. 2014. Korelasi pertambangan emas tradisional terhadap keadaan sosial ekonomi masyarakat : kasus di Kabupaten Madina (Sumut). *Prosiding ekspos hasil penelitian*. (Online). 1-7. (<http://researchgate.net/>, diakses 20 September 2018).
- Hasiani, P. 2013. Analisis kesediaan membayar WTP (Willingnes To Pay) dalam upaya pengelolaan objek wisata Taman Alun Kapuas Pontianak, Kalimantan Barat. *J. Hutan Lestari*. (Online). 1(1) : 1-10. (<http://jurnal.untan.ac.id/>, diakses pada 6 November 2018).
- Irawan, A., Iwanuddin., Halawane, J.E. dan Ekawati, S. 2017. Analisis persepsi dan perilaku masyarakat terhadap keberadaan kawasan KPHP Model Poigar. *J. Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. (Online). 14(1) : 71-82. (<http://researchgate.net/>, diakses 22 September 2018).
- Masria., Golar. dan Ihsan, M. 2015. Persepsi dan sikap masyarakat lokal terhadap hutan di Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala. *J. Warta Rimba*. (Online). 3(2) : 57-64. (<http://jurnal.untad.ac.id/>, diakses 20 Juli 2018).
- Nababan, E.J.K., Qurniaty, R. dan Kustanti, A. 2016. Modal sosial pada pengelolaan dan pelestarian hutan mangrove di Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. *J. Sylva Lestari*. (Online). 4(2) : 89-100. (<http://jurnal.fp.unila.ac.id/>, diakses pada 28 Oktober 2018).
- Napitupulu, D.F., Asdak, C. dan Budiono. 2013. Mekanisme imbal jasa lingkungan di sub-das Cikapundung (Studi kasus pada Desa Cikole dan Desa Suntenjaya Kabupaten Bandung Barat). *J. Ilmu Lingkungan* (Online). 11(2) : 73-83. (<http://ejournal.undip.ac.id/>, diakses 20 Jul 2018).
- Nurhanafi, I., Purnaweni, H. dan Hidayat, Z. 2016. Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Semarang. *J. Of Public Policy and Management Review*. (Online). 5(2) : 857-872. (<http://ejournal3.undip.ac.id/>, diakses 2 Juli 2018).
- Pradana, B.E. 2017. Penegakan hukum terhadap pertambangan batu breksi ilegal di Kabupaten Bantul. *J.uajy*. (Online). 17 hlm. (<http://ejournal.uajy.ac.id/>, diakses 12 September 2018).
- Prasada, I.D.N.I., Astiti, N.W.S. dan Handayani, M.T. 2016. Perilaku masyarakat dalam pemeliharaan hutan lindung di Banjar Kedisan, Desa Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. *J. agribisnis dan agrowisata*. (Online). 5(1) : 1-10. (<http://id.portalgaruda.org/>, diakses 26 Oktober 2018).
- Purwanti, E. dan Rohayati, E. 2014. Pengaruh jumlah tanggungan keluarga, pendapatan, terhadap partisipasi kerja tenaga kerja wanita pada industri kerupuk kedelai di Tuntang. Kabupaten Semarang. *J. ilmiah among makarti*. (Online). 7 (13) : 1-11. (<http://jurnal.stieama.ac.id/>, diakses 20 Oktober 2018).
- Rachdian, A. 2015. *Identifikasi perubahan jasa lingkungan dengan menggunakan penginderaan jauh dari sistem informasi geografis di Bogor*. Skripsi. Bogor: Institut Pertanian Bogor. 49 hlm.
- Satriana, N., Yarmaidi. dan Miswar, D. 2015. Analisis perubahan penggunaan lahan RTH publik Kota Bandar Lampung tahun 2009-2015. *J. Penelitian Geografi*. (Online). 3(2) : 1-12. (<http://id.portalgaruda.org/>, diakses 2 Juli 2018).
- Setiawan, A. dan Hermana, J. 2013. Analisa kecukupan ruang terbuka hijau berdasarkan penyerapan emisi CO2 dan pemenuhan kebutuhan oksigen di Kota Probolinggo. *J. Teknik Pomits*. (Online). 2(2) : 171-174. (<http://ejurnal.its.ac.id/>, diakses 10 Juli 2018).

- Setiawan, G., Syaufina, L. dan Puspaningsih, N. 2015. Estimasi hilangnya cadangan karbon dari perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Bogor. *J. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan*. (Online). 5(2) : 141-147. (<http://journal.ipb.ac.id/>, diakses 10 Juli 2018).
- Sudjarmoko, B., Hasibuan, A.M. dan Samsudin, 2015. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membayar petani membiayai teknologi pengendalian hama pengisap pucuk dan penyakit cacar daun teh. *J. TIDP*. (Online). 2(1) : 21-28. (<http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/>, diakses 28 Agustus 2018).
- Sugiyono. 2011. *Metode penelitian kuantitatif kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta. 334 hlm.
- Sulistiyorini, I. S., Edwin, M. dan Asti, W. 2015. Analisis kecukupan ruang terbuka hijau di Kota Sangatta, Kabupaten Kutai Timur. *J. Hutan Tropis*. (Online). 3(1): 1-7. (<http://ppjp.unlam.ac.id/>, diakses 10 Agustus 2018).
- Surati. 2014. Analisis sikap dan perilaku masyarakat terhadap hutan penelitian Parung Panjang. *J. Penelitian sosial dan ekonomi kehutanan*. (online). 11(4) : 339-347. (<http://media.neliti.com/>, diakses 7 November 2018).
- Suryadi, A., Zainal, S. dan Muin, S. 2015. Sikap masyarakat Desa Sungai Nilam terhadap penebangan kayu tanpa izin (Studi kasus di Desa Sungai Nilam Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas. *J. Hutan Lestari*. (Online). 4(2) : 250-257. (<http://jurnal.untan.ac.id/>, diakses 5 November 2018).
- Tampubolon, B.I. 2011. *Analisis willingness to accept masyarakat akibat eksternalitas negatif kegiatan penambangan batu gamping*. Skripsi. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 112 hlm.
- Yanti, F. 2016. *Kualitas RTH publik di Kota Bandar Lampung (Studi kasus Lapangan Merah dan Pasar Seni, Lapangan Kalpataru dan Embung Sukarame/Taman Kota)*. Thesis. Bandar Lampung : Universitas Lampung. 69 hlm.